

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kriteria tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi komitmen internasional yang disepakati oleh Indonesia salah satunya adalah untuk mewujudkan *Millenium of Development Goals* (MDGs). MDGs adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berlaku sejak September 2000 yang berisikan delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015 dengan tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Salah satu tujuan yang tertuang dalam MDGs adalah untuk mencapai pendidikan dasar untuk seluruh masyarakat. Pendidikan dasar dapat diperoleh bukan hanya semata-mata cukup dengan adanya keinginan dari masyarakat, namun diperlukan pula sarana prasarana yang dapat menunjang.

Pendidikan dalam arti luas memiliki makna mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan pentingnya peningkatan dalam kualitas pendidikan itu sendiri. Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan perlu diwujudkan agar diperoleh sumber daya manusia Indonesia yang dapat menunjang pembangunan nasional, hal ini bisa dimulai

dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana pendidikan harus terus diupayakan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dunia pendidikan Indonesia saat ini masih memiliki kendala yang berkaitan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pelayanan pendidikan, jumlah guru disekolah yang belum merata, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, tidak meratanya pelayanan pendidikan, dan kualitas pengajar yang masih kurang kompeten.

Salah satu tujuan MDGs dalam bidang pendidikan yaitu pemenuhan pencapaian pendidikan dasar yang dapat di lihat perkembangannya dari indikator pendidikan terdiri dari partisipasi sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama studi, rasio murid laki-laki dan perempuan mencapai 100 % dan lain-lain. Hingga saat ini, Indonesia telah mencapai target minimal MDGs yaitu akses bagi seluruh anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan wajib (6 tahun).

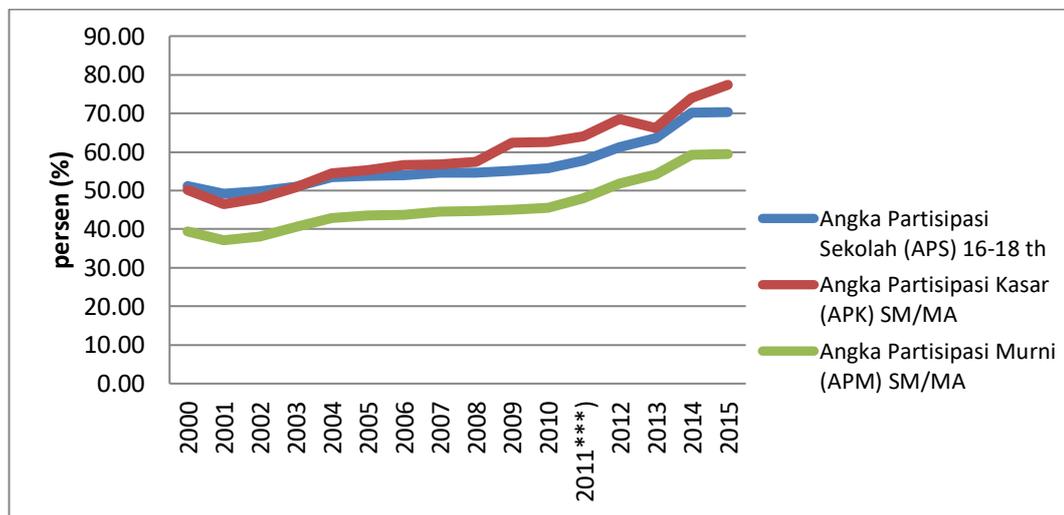
Berdasarkan laporan dari BAPPENAS dan UNDP, pencapaian target untuk tingkat partisipasi sekolah dasar, Indonesia telah mencapai target 94,7% dan dengan kondisi ini dapat mencapai 100% pada tahun 2015. Meskipun secara presentase pencapaian pendidikan di Indonesia sudah sejalan dengan sasaran MDGs, namun bila kita melihat pencapaian pendidikan Indonesia secara umum jika dibandingkan dengan negara lain menurut UNESCO melalui EFA (*Education*

For All) Global Monitoring Index, tentunya pemerintah masih harus lebih giat dalam melaksanakan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan program pendidikan agar dapat bersaing dengan negara lain. Berdasarkan EFA *Global Report* pada tahun 2012, *Education Development Index* (EDI) Indonesia menduduki peringkat 68 dari 113 Negara. Selain itu, merujuk kepada EFA *Global Monitoring Report* di tahun 2012, Indonesia juga masih tergolong sebagai negara dengan level ECCE (*Early Childhood Care and Education*) rendah dengan nilai indeks dibawah 0.800. Indonesia berada pada peringkat 5 dari 10 Negara di ASEAN, Indonesia masih kalah dengan Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, dan Thailan. Pada tahun 2017 Indonesia berada pada posisi 108 di dunia dengan skor 0.603 di Indeks Pendidikan UNDP. Secara umum kualitas pendidikan Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan Palestina, Samoa, dan Mongolia. Hanya 44% penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan menengah, sedangkan sisanya 11% gagal untuk menuntaskan atau keluar dari sekolah.

Melihat kepada fakta diatas, dapat kita sadari bahwa meskipun secara persentase Indonesia sudah dapat mencapai target MDGs pada tahun 2015, pemerintah masih harus terus mengakselerasi program-program pendidikan lainnya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Untuk mencapai target tersebut, tampaknya pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan utama di dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini.

Sejak tahun 1970-an, angka partisipasi sekolah meningkat cukup besar sebagai akibat dari upaya pemerintah untuk terus membangun gedung sekolah di seluruh indonesia serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Sejak

tahun 1994, pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan target partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mencapai 90 persen, paling lambat pada tahun 2008. Indikator pendidikan merupakan gabungan data pendidikan yang dikembangkan untuk menerangkan suatu keadaan yang menace pada kebijakan pendidikan yang diterapkan. Indikator pendidikan Indonesia dapat dilihat melalui APS, APK , APM, dan Angka Melek Huruf.



Grafik 1.1

Perkembangan Indikator Pendidikan Indonesia Tahun 2000 - 2015

Sumber: BPS (data diolah)

Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa persentase indikator pendidikan Indonesia yang digambarkan oleh APS, APM, dan APK menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata perkembangan angka APS dan APK di Indonesia sudah berada di atas 50%, hal ini menandakan bahwa lebih dari setengah masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan menengah atas. Hal yang berbeda jika dilihat dari grafik APM di Indonesia, pada grafik menunjukkan jika

rata-rata perkembangan APM masih berada dibawah 50% dari tahun 2010 hingga tahun 2011, sedangkan tahun 2012 sampai 2015 terjadi peningkatan yang cukup baik berada diatas 50%

Angka partisipasi murni adalah proporsi pada jenjang pendidikan tertentu yang bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhitungan pada angka partisipasi murni didasarkan pada anak-anak yang bersekolah tepat pada waktunya, yang sesuai dengan umur dan jenjang pendidikannya, jadi untuk masyarakat yang mengikuti paket c tidak termasuk dalam perhitungan angka partisipasi murni. Hal ini yang menyebabkan rendahnya nilai apm bila dibandingkan dengan indikator pendidikan lainnya.

Tentunya hal ini menjadi pertanyaan dari beberapa pihak, mengapa untuk angka partisipasi jenjang SMA/MA masih rendah? Banyak faktor yang dapat menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah sampai jenjang menengah, diantaranya adalah kurangnya motivasi dari diri sendiri maupun orang tua, keadaan ekonomi keluarga yang kurang mendukung karena untuk sekolah menengah biasanya membutuhkan biaya yang lebih besar, pandangan mengenai sosial dan budaya, serta persebaran sekolah menengah tidak merata di seluruh Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan bidang pendidikan di Indoensia sudah mencapai kemajuan yang baik dalam pencapaian MDGs, namun memang pada realita yang ada masih terdapat anak-anak usia sekolah yang masih belum dapat menikmati pendidikan. Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak

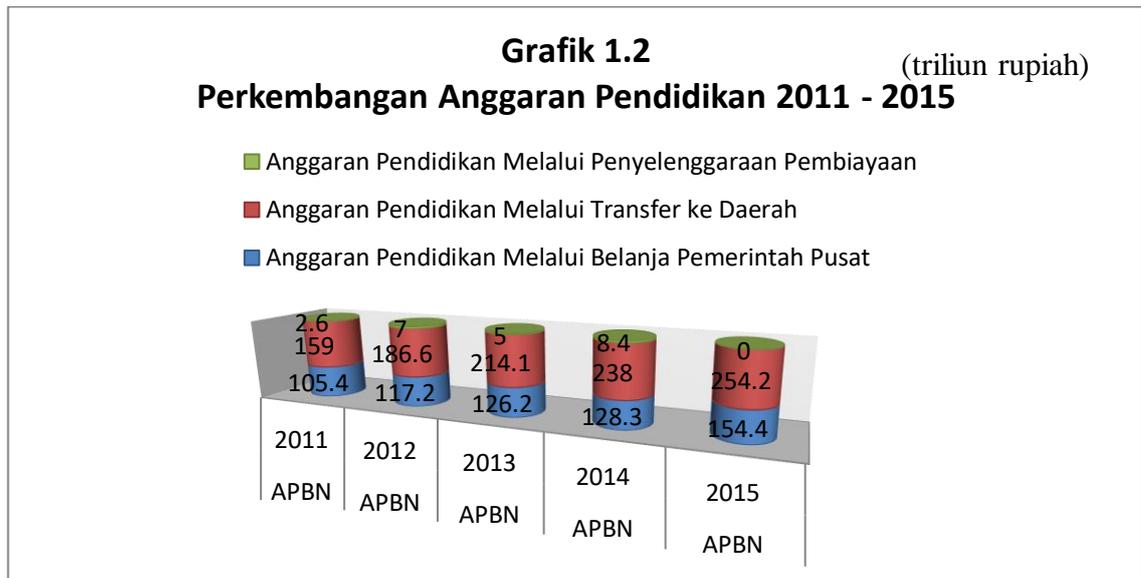
Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Menurut Bank Dunia (Peningkatan Kualitas Pendidikan, 2007 dalam Septiana, 2008) masalah yang dihadapi Indonesia di bidang pendidikan yaitu partisipasi sekolah yang sangat timpang antar daerah karena tidak semua anak mampu bersekolah. Anak dari kelompok miskin keluar dari sekolah lebih dini karena pendapatan orangtua yang masih rendah, kualitas sekolah di Indonesia masih rendah dan cenderung memburuk, persiapan dan kehadiran tenaga pengajar yang masih kurang, serta pemeliharaan sekolah tidak dilakukan secara berkala.

Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan sangat mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan tersebut. Anggaran Pendidikan yang memadai akan sangat mempengaruhi mutu pendidikan.¹ Menurut Glosarium pendidikan,² Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

¹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2006), hal. 45

² www.mandikdasmn.depdiknas.go.id



Berdasarkan gambar 1.3 anggaran pendidikan pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kenaikan anggaran yang cukup besar terjadi pada tahun 2015 sebesar 154,4 milyar untuk anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat dan 254,2 milyar untuk anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah. Undang-undang sistem pendidikan dasar yang mengamatkan 20% alokasi belanja daerah untuk sektor pendidikan belum memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian pada *outcomes* bidang pendidikan.

Meskipun anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dan perbaikan anggaran khususnya anggaran untuk ke daerah yang semakin di tingkatkan. Faktanya, yang terjadi saat ini anggaran pendidikan masih belum berjalan dengan optimal, hal ini bisa dirasakan dengan belum meratanya pelayan pendidikan ke daerah khususnya daerah terpencil, masih ada beberapa bangunan sekolah yang kurang layak, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Pada tahun 2016 anggaran pendidikan mencapai Rp 419,2 triliun atau 20 persen dari total belanja negara Rp 2095,7 triliun. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa mendapat sebesar Rp 267,9 triliun dan anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 triliun.³ Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan harus lebih dari 20%, APBN mengalokasikan dana sebesar 20 persen untuk anggaran pendidikan, dari dana alokasi tersebut kemudian dibagi kepada 20 kementerian dan transfer ke daerah. Untuk transfer ke daerah sebesar 65 persen.

Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) pada tahun 2016, hanya provinsi DKI Jakarta yang mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20 persen. Alokasi tertinggi ditempati oleh DKI Jakarta sebesar 22,3 persen, Kalimantan Selatan sebesar 9,8 persen, Yogyakarta 9,7 persen, Kep. Riau 9,6 persen, dan Maluku Utara 9,2 persen. Untuk alokasi terendah adalah provinsi Jawa Timur sebesar 1,7 persen dan Papua 1,4 persen. Hal ini bisa disebabkan oleh masih rendahnya pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga daerah sulit untuk memenuhi alokasi 20 persen serta masih kurangnya komitmen di daerah dalam pemenuhan alokasi sebesar 20 persen tersebut.

Ditengah rendahnya komitmen terhadap anggaran, pemerintah berusaha menyasati dengan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) yang diperoleh dari PKPS BBM serta pengembangan pendidikan luar sekolah (PLS). Namun, BOS tersebut adalah kebijakan yang bersifat hanya sementara saja karena keberadaannya tidak *sustainable*. Pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan

³ [www.liputan6.com](http://bisnis.liputan6.com/read/2356557/anggaran-pendidikan-di-apbn-2016-cetak-sejarah), “Anggaran Pendidikan di APBN 2016 Cetak Sejarah”, dalam (<http://bisnis.liputan6.com/read/2356557/anggaran-pendidikan-di-apbn-2016-cetak-sejarah>), di akses pada

Kebudayaan (Kemendikbud) mulai meluncurkan program KJP, kebijakan ini dilakukan dengan tujuan dalam upaya memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) untuk menempuh pendidikan lebih lama dan lebih baik yang diwujudkan dengan program wajib belajar 12 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan, yatim piatu/ yatim/ piatu, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Seiring dengan berjalannya waktu, peningkatan pelayanan publik terus digencarkan oleh pemerintah dan menjadi anggaran wajib yang diselenggarakan pada setiap tahunnya. Terdapatnya masyarakat yang belum mengenyam pendidikan bukan semata-mata hanya disebabkan oleh pemerintah, namun peran masyarakat itu sendiri juga diperlukan dalam berpartisipasi menggunakan pelayanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Seperti adanya kendala pada pendapatan yang dimiliki oleh suatu keluarga, seringkali karena rendahnya jumlah pendapatan yang dimiliki mereka mengesampingkan urusan pendidikan dan lebih memprioritaskan pendapatan mereka untuk kebutuhan sehari-hari.

Tabel 1.1
PDRB perkapita Indonesia Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB perkapita	
	ADHB	ADHK
2010	Rp111.529.000	Rp111.529.000
2011	Rp125.534.000	Rp117.673.000
2012	Rp138.858.000	Rp123.962.000
2013	Rp155.170.000	Rp130.111.000
2014	Rp174.824.000	Rp136.408.000

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pendapatan masyarakat Indonesia pada tabel diatas mengalami kenaikan setiap tahunnya, pendapatan perkapita dibagi menjadi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp 111.529.000 meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp 174.824.000. Sedangkan pendapatan perkapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 juga mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp 111.529.000 dan Rp 136.408.000.

Masalah yang tak kalah pentingnya untuk bidang pendidikan di Indonesia adalah ketersediaan guru. Setiap tahun, ada saja keluhan dari pelbagai daerah soal kekurangan guru pendidikan dasar menengah. Menurut PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, rasio ideal guru dan murid itu berkisar antara 1:15 sampai 1:20, tergantung tingkatan pendidikan. Berdasarkan data Ikhtisar Data Pendidikan Kemendikbud Tahun 2016/2017, provinsi yang memiliki rasio antara guru dan murid yang mendekati aturan dalam PP adalah Provinsi Papua, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Di Papua, total murid dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa sebanyak 659.249 orang murid. Sementara jumlah guru tercatat sebanyak 30.093 orang. Artinya rasionya mencapai 1:22. Sementara Jawa Barat dan Banten masing-masing memiliki rasio 1:21. Adapun di DKI Jakarta jumlah murid dari berbagai jenjang saat ini tercatat sebanyak 1.701.450 orang dengan jumlah guru mencapai 84.118 orang atau rasio 1 guru mengampu 20-an murid.

Selain permasalahan mengenai anggaran pendidikan dan persoalan yang terdapat pada diri individu masyarakat, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi apakah pelayanan pendidikan yang telah diupayakan oleh pemerintah dapat bekerja secara optimal atau tidak. Sejalan dengan perkembangannya pada awal tahun 2001 dimulai pemberlakuan otonomi daerah yang didasarkan atas undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, muncullah kebijakan baru yang dikenal dengan otonomi daerah yang kemudian diberlakukanlah sistem desentralisasi.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan sejalan dengan otonomi daerah yang ditetapkan untuk menggantikan kebijakan sentralisasi yang dulu berjalan di Indonesia. Kebijakan sentralisasi mengandung arti bahwa segala hal yang berhubungan dengan pemerintah dan pembangunan merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh para birokrat pemerintah pusat. Jika hal ini terus terjadi, dapat mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan menimbulkan ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah pusat menciptakan kebijakan baru yang bernama desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah diberi kesempatan yang relatif luas bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat serta mendorong daerah untuk melakukan keputusan secara mandiri

tanpa harus bergantung dari kebijakan pusat.⁴ Pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerahnya masing-masing.

Menurut Kacung Marijan⁵, terdapat tiga perspektif dalam pemahaman mengenai desentralisasi fiskal. Pertama adalah perspektif politik. Pada perspektif ini desentralisasi ditempatkan dalam konteks relasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan demokrasi di Indonesia. Kedua, perspektif administrasi yang cenderung membahas desentralisasi dalam konteks pembagian kewenangan antara lembaga-lembaga di pemerintah daerah. Ketiga, perspektif ekonomi. Dalam perspektif ini terdapat dua hal, pertama desentralisasi berkaitan dengan pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Kedua, desentralisasi adalah privatisasi pelayanan publik. Bidang pendidikan salah satu kewenangan yang secara administratif diberi kebebasan dalam beberapa hal.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan dengan memberikan diskresi belanja daerah yang luas dan didukung oleh pendanaan transfer dari pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan.⁶ Dengan pemberlakuan sistem desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal di berbagai sektor seperti sektor publik, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

⁴ Daryono Soebagyo dkk. *Analisis Daya Saing Daerah dan Implikasinya terhadap Pembangunan Wilayah di Jawa Tengah*. (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)

⁵ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm 138

⁶ Mangasa Augustinus Sipahutar, 201, "Desentralisasi Fiskal dan Perekonomian Daerah". Dalam <http://www.investor.co.id/home/desentralisasi-fiskaldan-perekonomian-daerah/62052>) diakses pada 1 Februari 2016

Dalam pembangunan pendidikan, diharapkan dengan berlakunya desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dan pengalokasian anggaran, sehingga kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dapat tepat sasaran dan tepat guna serta pembangunan pendidikan dapat dilaksanakan secara merata. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pembangunan pendidikan di era otonomi daerah yang diiringi dengan kebijakan desentralisasi fiskal tidak menjamin kian meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat di daerah. Hal ini dikarenakan desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum meratanya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat ditunjukkan dengan masih belum meratanya perkembangan pembangunan pendidikan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin membahas sejauh mana Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan perkapita, dan Rasio Murid per Guru terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan di Indonesia Tahun 2014 - 2015.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana terhadap *outcome* bidang pendidikan di Indonesia Tahun 2014 - 2015.
- b) Pengaruh anggaran pendidikan terhadap *outcome* bidang pendidikan di Indonesia Tahun 2014 - 2015.

- c) Pengaruh pendapatan perkapita terhadap *outcome* bidang pendidikan di Indonesia Tahun 2014 - 2015.
- d) Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap *outcome* bidang pendidikan di Indonesia Tahun 2014 - 2015.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *outcome* bidang pendidikan, peneliti hanya membahas pada masalah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap *outcome* bidang pendidikan 30 provinsi di Indonesia tahun 2014 - 2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas dan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran, maka penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap *outcome* bidang pendidikan 30 provinsi di Indonesia Tahun 2014 - 2015?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah ilmu referensi informasi serta khasanah ilmu tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi *outcome* bidang pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai informasi mengenai *outcome* bidang pendidikan bagi masyarakat.
- b. Untuk pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana dalam hal menanggulangi masalah pelayanan pendidikan melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas dari pelayanan publik.
- c. Fakultas Ekonomi UNJ untuk memperkaya khasanah penelitian ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, dan masukan bagi civitas akademika selanjutnya yang berminat untuk meneliti masalah ini, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi khususnya perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.